

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PER KAPITA DAN  
TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
HIBURAN DENGAN TINGKAT KONSUMSI SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING  
(STUDI KASUS PADA 5 PEMERINTAH KOTA DI WILAYAH  
JAWA BARAT)**

*Mulyani*  
*Universitas Padjadjaran, Indonesia*  
*Dede Abdul Hasyir*  
*Universitas Padjadjaran, Indonesia*

**ABSTRACT**

*This research is intended to examine the effect of per capita income and the rate of inflation to tax revenues entertainment with consumption levels as an intervening variable on 5 cities of Western Java from 2008-2013. Using path analysis, this research also aims to examine direct and indirect effects of income per capita and inflation rate on tax revenues entertainment.*

*The statistical result showed that per capita income have a positive effect on tax revenue with consumption level as an intervening variable. It's also showed that inflation rate have a negative effect on tax revenue with consumption level as an intervening.*

*Keywords: Per capita income, rate of inflation, consumption levels, tax revenues entertainment.*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui beberapa upaya yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan Nasional harus adil dan merata di seluruh tanah air, maka dari itu untuk mencapai pemerataan tersebut tidak terlepas dari adanya peranan pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya (Muctholifah,2010) yang mana ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang di dalamnya mengatur tentang Otonomi Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota yang ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Sehingga setiap pemerintah kota dan kabupaten berlomba-lomba untuk membangun dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dibutuhkan faktor-faktor yang menunjang disetiap pembangunannya, dan faktor yang paling terpenting yaitu dari segi keuangan (dana). Pembangunan tidak akan berjalan tanpa di dukung dengan dana yang memadai, karena kemampuan keuangan suatu daerah menunjukkan kemampuan daerah tersebut dalam membangun daerahnya.

Keuangan (dana) pemerintah daerah bersumber dari pendapatan daerah antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Komponen utama PAD berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Undang-undang No 28 tahun 2009). Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak tanah dan bangunan serta pajak air bawah tanah.

Jawa Barat selain dikenal dengan kota seni kini dikenal pula sebagai provinsi yang memiliki banyak tempat wisata, ± 350 objek wisata terdapat di Jawa Barat. Objek wisata dan seni yang dikenal menjadikan bidang usaha pariwisata salah satu bentuk usaha bisnis di Jawa Barat selain hotel dan kuliner. Letak geografis Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, serta keragaman objek wisata dan tempat-tempat yang dimiliki oleh Kabupaten /Kota di Jawa Barat yang sangat bervariasi menjadikan Jawa Barat sebagai tempat yang strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak Jawa Barat khususnya penerimaan pajak hiburan. Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat yang terkenal dengan surga kuliner & fashion dan kini dikenal dengan kota yang memiliki tempat-tempat wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan, selain kota Bandung kota-kota di Jawa Barat seperti Sukabumi, Depok, Bogor dan Bekasi memiliki objek-objek wisata yang dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan daerah tersebut.

Tabel 1.1

Presentasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung

Jenis Pajak	2008	2009	2010	2011	2012
Hotel	29,7 %	25,3%	29,0%	16,8%	17,4%
Restoran	26,2%	23,1%	24,3%	12,9%	11,9%
Hiburan	9,3%	15,8%	8,8%	4,7%	4,1%
Reklame	9,1%	11,4%	3,8%	2,3%	2,3%
Penerangan Jalan	23,2%	22,6%	32,1%	16,4%	14,5%
Parkir	2,4%	1,7%	1,9%	0,9%	2,4%
Tanah dan Bangunan	-	-	-	45,7%	47,0%
Air Bawah Tanah	-	-	-	0,4%	0,4%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dari tabel 1.1 memperlihatkan bahwa penerimaan pajak hiburan di kota Bandung dari tahun 2008-2012 memiliki persentase dibawah 10% kecuali untuk tahun 2009, dan bila dilihat persentase



penerimaan pajak hiburan kota Bandung selalu mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali tahun 2009. Sedangkan bila dilihat dari realisasi penerimaan selalu melebihi dari target yang ditentukan, namun bila dilihat dari segi pencapaian mengalami fluktuasi baik kenaikan maupun penurunan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun  
2008 - 2012

Tahun	Target ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Pencapaian (%)
2008	15.580.532.190	20.181.782.568	129,53
2009	23.134.992.974	45.216.872.298	195,45
2010	25.000.000.000	26.747.603.927	106,99
2011	28.000.000.000	31.019.515.619	110,78
2012	33.000.000.000	33.856.025.207	102,59

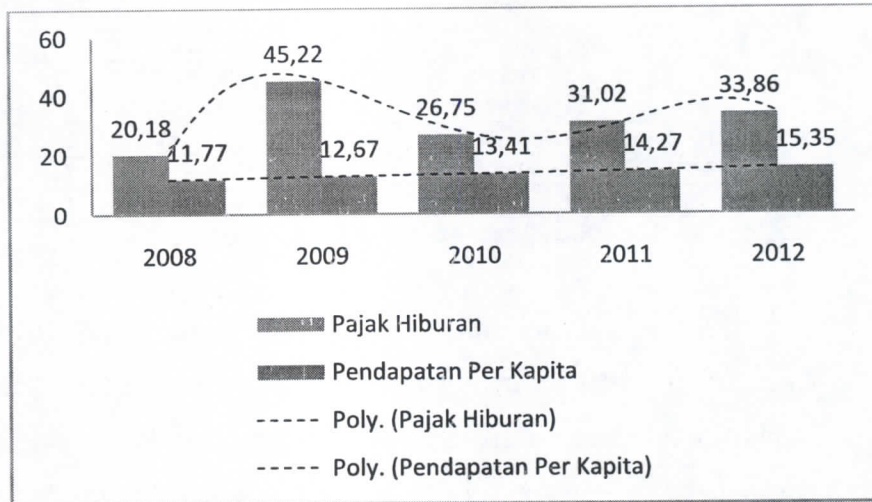
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Penurunan pencapaian terjadi pada tahun 2012 dari 110,78% menjadi 102,59% ini merupakan fenomena yang menarik karena pada tahun 2012 Master Card Survey on Consumer Purchasing priorities menempatkan Bandung di urutan pertama sebagai tempat wisata yang paling banyak dikunjungi dan dinas pariwisata menunjukkan bahwa jumlah pengunjung wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung pada tahun 2012 mencapai 3.513.705 orang. Dengan banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung serta survey mendukung, namun nyatanya penerimaan pajak hiburan mengalami fluktuasi.

Pendapatan per kapita menurut Sudarno Sukirno adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu masa tertentu. Pendapatan per kapita yang digambarkan dengan PDRB per kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk. Jika PDRB suatu daerah meningkat berarti kemampuan

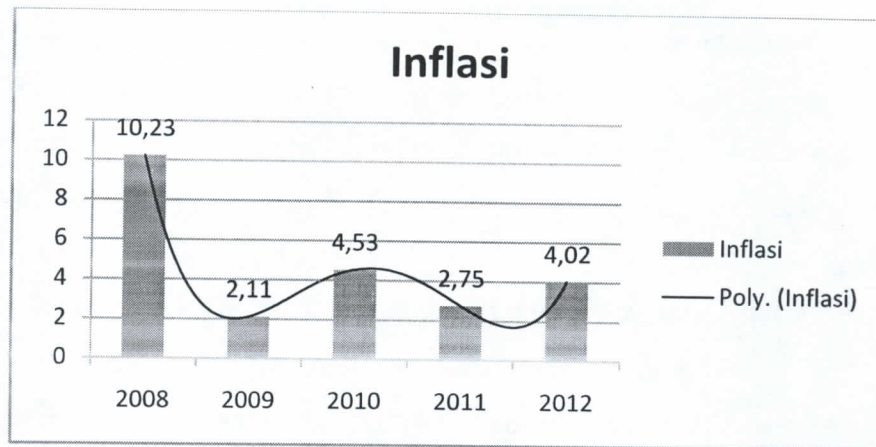


daerah dalam membayar pajak juga meningkat, dengan kata lain potensi penerimaan pajak dalam daerah tersebut juga semakin besar (Masrofi,2004). Dan salah satu penerimaan pajak daerah yaitu pajak hiburan. Endah Wahyuni (2009) menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Surabaya. Sehingga semakin meningkat pendapatan per kapita maka penerimaan pajak hiburan meningkat.



Grafik 1.1

Grafik Penerimaan Pajak Hibuzzran Dan Pendapatan Per Kapita Tahun 2008-2012



Grafik 1.2

Grafik Inflasi Kota Bandung Tahun 2008 – 2012

Tetapi dalam grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita kota Bandung dari tahun 2008-2012 mengalami kenaikan setiap tahunnya yang relative signifikan dan dilihat dari trennya bersifat linear. Namun bila dilihat dari penerimaan pajak hiburan kota Bandung dari trennya mengalami fluktuatif, sehingga tren dari pendapatan per kapita tidak sama dengan tren penerimaan pajak hiburan. Dimana penerimaan pajak hiburan salah satu dari sumber penerimaan pajak hiburan, dan hiburan merupakan salah satu konsumsi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus. Inflasi cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan masyarakat. Ketika inflasi tinggi masyarakat akan menurunkan tingkat daya beli dan konsumsi dan salah satu konsumsi yang akan dikurangi yaitu konsumsi akan hiburan. jika masyarakat mengurangi konsumsi akan hiburan, maka penerimaan akan tempat hiburan mengalami penurunan dan efeknya penerimaan pajak hiburan akan menurun. Pada grafik 1.2 tahun 2012 tingkat inflasi kota Bandung mengalami kenaikan dari tahun 2011, namun nyata nya penerimaan pajak hiburan

mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan ini perlu dianalisis pengaruh pendapatan per kapita dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak hiburan dengan tingkat konsumsi sebagai variabel intervening.

### **KERANGKA PEMIKIRAN DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Pembangunan Nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, tak lepas dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam pembangunan daerah tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang diperlukan, yang paling terpenting yaitu kebutuhan akan keuangan (dana). Salah satu indikator untuk mengetahui kemandirian suatu daerah adalah dengan Pendapatan Asli Daerah yang dilihat dari Pajak Daerah. Dari berbagai macam jenis pajak daerah, salah satunya yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Menurut Miyasto (1993) (dalam Hadi Sasana, 2005) mengatakan bahwa pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, termasuk membayar pajak. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan besarnya pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar pajak dan berpengaruh positif terhadap



penerimaan pajak. Pendapatan daerah salah satu nya disumbangkan oleh pendapatan dari masyarakat daerah tersebut. Sehingga semakin besar pendapatan, kekayaan dan konsumsi suatu daerah maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat. Dwi dan Sudarsana (2014) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh langsung dan nyata terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerahnya, dimana salah satu sumber dari pajak daerah yaitu pajak hiburan. Tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan yang dimiliki, Keynes dalam teorinya yang dikenal sebagai Teori Konsumsi Keynes menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima dengan konsumsi yang dilakukan. Pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh seseorang artinya apabila pendapatan meningkat maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Pendapatan per kapita suatu daerah dapat di lihat dari PDRB daerah tersebut, maka semakin tinggi PDRB suatu daerah maka konsumsi masyarakatpun akan mengalami peningkatan. Moch Cahyo Sucipto (2012), melakukan penelitian yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat Purwakarta. Salah satu bentuk konsumsi yang dilakukan masyarakat yaitu konsumsi akan hiburan, bila PDRB suatu daerah meningkat maka konsumsi masyarakat akan hiburan meningkat, sehingga penerimaan pajak hiburan meningkat. Maka semakin tinggi pendapatan per kapita daerah tersebut maka penerimaan pajak hiburan akan meningkat. Sehingga pendapatan per kapita akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan

melalui tingkat konsumsi.

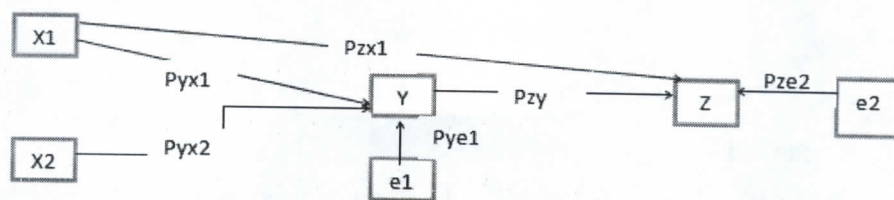
Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum yang berlangsung terus menerus. Inflasi cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat (Sukirno, 2006). Konsumsi dan daya beli masyarakat dipengaruhi pula oleh tingkat inflasi, ketika inflasi tinggi maka masyarakat cenderung akan mengurangi tingkat daya beli dan konsumsi baik konsumsi akan barang pokok maupun jasa, dimana salah satu nya konsumsi akan hiburan sehingga tingkat inflasi berpengaruh negative terhadap tingkat konsumsi. Artinya ketika masyarakat mengurangi konsumsi akan hiburan, maka penerimaan tempat hiburan akan mengalami penurunan dan berdampak penurunan pada penerimaan pajak hiburan. Sehingga tingkat inflasi berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak hiburan melalui tingkat konsumsi.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dekriptif dengan pendekatan data yang digunakan yaitu pendekatan data *panel*. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kota dan Kabupaten di Jawa Barat sedangkan sampel yang digunakan yaitu 5 pemerintah kota di wilayah Jawa Barat diantaranya kota Bandung, kota Sukabumi, kota Depok, kota Bogor dan kota Bekasi. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Variabel-variabel yang dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) yaitu penerimaan pajak hiburan dan pendapatan per kapita di ubah menjadi

logaritma natural dalam proses pengolahan data.

Setelah diperoleh data-data yang diperlukan, maka dilakukan proses analisis statistik atau menguji statistik sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Sebelum dilakukan uji statistik, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif dan uji normalitas untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk uji statistik yaitu *Path Diagram (Analisis Jalur)*, dengan diagram jalur sebagai berikut:



dengan dua persamaan struktural:

Persamaan struktural pertama:

$$Y = P_{yx1} X_1 + P_{yx2} X_2 + e_1$$

Persamaan struktural kedua:

$$Z = P_{zx1} X_1 + e_2$$

Dari diagram jalur dan persamaan diatas, maka ditarik perumusan hipotesis sebagai berikut:

Secara Simultan

$H_0 : p_{yx1} = p_{yx2} = p_{zy} = p_{zx1} = 0$  (Pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan tingkat konsumsi tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak hiburan.)



Ha :  $pyx1 = pyx2 = pzy = pzx1 \neq 0$  (Pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan tingkat konsumsi berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak hiburan.)

Secara Parsial

Ho1 :  $Pyx1 = 0$  ; Artinya tidak ada pengaruh pendapatan per kapita terhadap tingkat konsumsi

Ha1 :  $Pyx1 > 0$  ; Artinya ada pengaruh pendapatan per kapita terhadap tingkat konsumsi

Ho2 :  $Pyx2 = 0$  ; Artinya tidak ada pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat konsumsi

Ha2 :  $Pyx2 > 0$  ; Artinya ada pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat konsumsi

Ho3 :  $Pzx1 = 0$  ; Artinya tidak ada pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak hiburan

Ha3 :  $Pzx1 > 0$  ; Artinya ada pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak hiburan

Ho4 :  $Pyx1.Pzy \leq 0$  ; Artinya tidak ada pengaruh positif pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak hiburan dengan tingkat konsumsi sebagai variabel intervening

Ha4 :  $Pyx1.Pzy > 0$  ; Artinya ada pengaruh positif pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak hiburan dengan tingkat konsumsi sebagai variabel intervening

Ho5 :  $Pyx2.Pzy \geq 0$  ; Artinya tidak ada pengaruh negative tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak hiburan dengan tingkat konsumsi sebagai variabel intervening

Ha5 :  $\beta_2 < 0$  ; Artinya ada pengaruh negative tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak hiburan dengan tingkat konsumsi sebagai variabel intervening

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk asumsi uji klasik yaitu uji normalitas dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang telah diuji menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dimana nilai test statistiknya lebih dari 0,05.

Tabel 1.4  
Uji Normalitas Persamaan Struktural 1

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	10.24487140
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.078
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Tabel 1.5  
Uji Normalitas Persamaan struktural 2

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000021
	Std. Deviation	7224153630.8445190
Most Extreme Differences	Absolute	.176
	Positive	.176
	Negative	-.096
Test Statistic		.176
Asymp. Sig. (2-tailed)		.018 <sup>c</sup>

Tabel 1.6  
Analisis Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatanperkapita	30	15.95	17.94	16.7106	.49606
Inflasi	30	1.30	11.15	5.7363	3.06241
konsumsi	30	4.69	4.96	4.8141	.08419
Pajakhiburan	30	18.37	24.53	22.3113	1.58291
Valid N (listwise)	30				

Sumber : hasil output SPSS

**Secara parsial hasil pengujian hipotesis dari persamaan struktural 1 dan 2 yaitu :**

- Variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap



tingkat konsumsi, bahwa nilai t hitung yang diperoleh sebesar 1.154 sedangkan t tabel yang diperoleh dengan tingkat signifikansi 0,05 dimana  $df = 30-2-1 = 27$  yaitu sebesar 2,052 dapat dilihat pula dari nilai sig sebesar 0,258 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bawa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi.

- Untuk variabel inflasi dari tabel 2.2 dilihat dari nilai sig sebesar 0,918 lebih besar dari 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak sehingga disimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi.
- Variabel pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan, dengan nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dimana *degree of freedom* =  $30-2-1= 27$  diperoleh nilai tabel sebesar  $2.052 < 7.277$  dan bila dilihat pada kolom Sig dimana nilai Sig  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak maka  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak hiburan.
- Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan penulis dari tabel 2.2 terdapat pengaruh positif pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak hiburan melalui tingkat konsumsi sebagai variabel intervening, karena hasil dari  $Pyx1.Pzy$  sebesar 0,0159 lebih kecil dari 0,05 maka  $H_a$  diterima dan,
- Hasil dari  $Pyx2.Pzy$  sebesar 0,0015 lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negative

terhadap penerimaan pajak hiburan dengan tingkat konsumsi sebagai variabel intervening.

### Secara simultan

Dalam pengujian secara simultan, variabel intervening (Tingkat konsumsi) dijadikan variabel independen. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa nilai Sig yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan pendapatan per kapita, tingkat inflasi dan tingkat konsumsi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan

Tabel 1.7  
Hasil analisis regresi

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2934770856181816	3	9782569520606055	17.654	.000 <sup>b</sup>
n	600000.000		00000.000		
Residual	1440764749937887	26	5541402884376490		
	400000.000		0000.000		
Total	4375535606119704	29			
	000000.000				

a. Dependent Variable: pajak hiburan

### SIMPULAN DAN SARAN

Pertama, dari nilai Adjusted R square diperoleh sebesar 0,633 atau 63,3% yang menggambarkan bahwa pengaruh pendapatan per kapita, tingkat inflasi dan tingkat konsumsi berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak hiburan dengan besarnya pengaruh 63,3%. Kedua, pendapatan per kapita dan tingkat inflasi tidak

berpengaruh terhadap tingkat konsumsi sedangkan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan. Ketiga, pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan dengan tingkat konsumsi sebagai variabel intervening dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan dengan tingkat konsumsi sebagai variabel intervening.

### **Saran bagi Pemerintah Daerah**

Melihat hasil penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak hiburan, serta pengaruh positif pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak hiburan dengan tingkat konsumsi sebagai variabel intervening. Dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan, pemerintah daerah memerhatikan variabel pendapatan per kapita (PDRB) dengan melihat besaran konsumsi. Selain itu mempertimbangkan variabel inflasi dalam setiap menetapkan target penerimaan pajak hiburan.

Dalam meningkatkan penerimaan dan realisasi pencapaian penerimaan pajak hiburan, diharapkan pemerintah daerah dapat melihat potensi terkait dengan tempat-tempat yang dikenakan pajak hiburan. Serta salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah selain menaikkan tarif pajak hiburan yaitu melakukan pengawasan internal terhadap tempat-tempat yang dikenakan pajak hiburan agar tidak terjadi kebocoran atas pajak hiburan yang mana akan berdampak terhadap penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak hiburan daerah tersebut.



### **Saran bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi yang memiliki potensi yang besar atas penerimaan pajak hiburan agar hasil penelitian lebih representative dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian antara variabel makro dengan variabel makro kembali. Selain itu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan seperti jumlah tempat hiburan, jumlah pengunjung, tarif pajak hiburan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. 2014. *Berita Resmi Statistik*. Kota Depok
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Barat Dalam Angka 2008-2014*. Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Bandung Dalam Angka 2008-2014*. Kota Bandung.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Bekasi Angka 2008-2014*. Kota Bekasi.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Bogor Dalam Angka 2008-2014*. Kota Bogor
- Badan Pusat Statistik. *Kota Depok Dalam Angka 2008-2014*. Kota Depok
- Badan Pusat Statistik. *Kota Sukabumi Dalam Angka 2008-2014*. Kota Sukabumi.
- Badan Pusat Statistik. *Tingkat Inflasi Gabungan 7 Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Provinsi Jawa Barat.
- Christian, Rame dan I Gusti Putu N.W. 2013. *Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung*. E-Jurnal EP Unud, 2 (10): 434-440. ISSN: 2303-0178.
- De, Lusi Nur Latifah. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi*

- dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak.* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.
- Duwi, priyatno. 2009. *5 jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Dwi, Sundi Marlianti dan Sudarsana Arka. 2014. *Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar.* E-Jurnal Ep Unud 2 (6): 265-271.
- Endang, Widjajanti. 1998. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta.* Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Fandy, Dewanto. 2015. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Pendapatan Asli Daerah.* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
- Fazriana, Nadya Haniz. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah di Kota Tegal.* Diponogoro Journal Of Economics Volume 3 No 1 hal 1-13.
- Gina, Noprianti. 2014. *Hubungan Program Event dengan Loyalitas Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung.* Repository UPI.
- Gregory, N. Mankiw. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro.* Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, Sasana. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas).* Jurnal Dinamika Pemabangunan : Volume 2 No 1 Hal: 19-29.
- Hera, Mokh IKhsan, Widyanti. 2007. *Indikator-indikator Makro Ekonomi.* Jakarta: FEUI
- Imam, Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS.* Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- . 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mardiasmo dan A. Mahfatih. 2000. *Laporan Akhir Penelitian Perhitungan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang.* Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Moc, Cahyo Sucipt. 2012. *Pengaruh PDRB dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Puwakarta Periode*



- 1992-2011. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mohammad, Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchtholifah. 2010. *Pengaruh PDRB, Inflasi, Infestasi Industri dan Jumlah tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Mojokorto*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan 1 (1).
- Muhammad, Masrofi. 2004. *Potensi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang)*. Tesis Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Dipenogoro.
- Noor, Lusy Arsy. 2013. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)*. Widyatama Repository.
- Noor, Lusy Arsy. 2013. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung)*. Widyatama Repository.
- Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014, Edisi Januari 2009.
- Pemerintah Kota Bandung. 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018*. Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bekasi. 2011. *Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) Tahun Anggaran 2012*. Kota Bekasi.
- Pemerintah Kota Bekasi. 2013. *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2012*. Kota Bekasi.
- Pemerintah Kota Bekasi. 2014. *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2013*. Kota Bekasi.
- Putri, Ambar Kusuma. 2014. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah 33 Provinsi Di Indonesia*. UNS-F. Ekonomi Jur. Ekonomi Pembangunan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- , Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- , Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Sarah, Olivia. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Wilayah Jabodetabek*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.



- Sarsiti, Rakirman. 2002. *Pengaruh Pendapatan Per kapita dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002-2009*.
- Siti, Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarno, Sukirno. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- . 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tilaar, Ricky M. 2013. *Analisis Hubungan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Se;atan*. Dalam Jurnal EMBA 1(3)
- Triani dan Kuntari, Yeni. 2010. *Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar*. Semarang: STIE Widya Manggala.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yudas, Anderson dan Audie. 2015. *Analisis Pengaruh Perkembangan Penduduk dan PDRB Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat di Molongguage Kabupaten Talaud*. Jurnal Vol 17 No 1.
- Yuli, Angriani. 2008. *Analisis Pengaruh Pendapatan Nasioanl, Inflasi, Dan Suku Bunga Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- [Http://layanan-dispenda.kotabogor.go.id](http://layanan-dispenda.kotabogor.go.id)